

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie , Jimly. 2007. *Demokrasi Lokal*, Jakarta PT. Rineka Cipta Rajawali
- Cholisin, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Dwiyanto, Agus , 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta . Gaja Mada University Press.
- Irianto , Sulistyowati dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasidan Refleksi*. Jakarta : Yayasan Obar Indonesia,
- Kansil, Christine. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka cipta .
- Koentjoroningrat, 1977,*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : P.T Gramedia
- Lubis ,Todung Mulya.2002. “*Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan*”.
- Meleong , Lexy J. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sebelas Maret Press.
- Soekanto , Soerjono dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta : Rajawalo Press
- Surbakt,Ramlan dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta : Kemitraan
- Surbakti ,Ramlan, Didik Supriyanto dan Topo Santoso.2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Sutopo , H. B.1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Tangkilisan, dan Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widia
- Wijardjo, Boedhi, Wahyudi Djafar, Yulianto.2008. “*Assessment Transparansi dan Akuntabilitas KPU pada Pelaksanaan Pemilu 2004: Sebuah Refleksi untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu*”. Jakarta : KRHN.

JURNAL dan LAPORAN

- Asshiddiqie , Jimly.2013. “*Pengenalan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*”, Makalah, Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kalimantan Tengah Dalam Angka 2015*.
- Badan Pengawas Pemilu Kalteng. 2016. *Rekapitulasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 2015*.

- Hendrasiti, Titiiek Kartika. 2015. *Praktik Politik Uang: Bentuk, Besaran, Peta, dan Rekonstrksi Penghapusan Pada Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Seluma*. Laporan Penelitian Komisi Pemilihan Umum Kaupaten Seluma
- KPU Provinsi Kalimantan Tengah. *Laporan Akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015 Susulan*.
- Lembaga Aministrasi Negara. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN RI.
- Nainggolan , Listiati. 2013. *Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Pemilihan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Bandar Lampung*. Skirpsi : Unila. hal 20
- Polli , Filli. 2014. *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(PEMILUKDA) Oleh Komisi Pemilihan Umum(KPUD)*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. II, No 6. Hal 119
- Yusdianto. 2010. *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme PenyelesaiannyaI*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, hal 44

Undang-undang

- Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, Nomor 11, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, “Kode etik penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi prilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan”..
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Aministrasi Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E

Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Artikel

Artikel www.kpu.go.id provinsi kalteng gelar pilkada susulan

Buletin Bawaslu . BAWASLU Award 2016 Sukses Digelar. Jakarta : Bawaslu RI edisi Januari-Februari 2016

Dikutip dalam “panitia pengawas pemilukada kecamatan bekasi barat kota bekasi”, dalam Website, <http://www.slideshare.net/lunandisyaiful/bab-v-pelanggaran-pemilu-dan-penangannya>

www.antarakalteng.com Jaya Warawana Manurung. Bawaslu memenangkan Gugatan Pemilih Terhadap KPU Kalteng.

www.kpud.cilacpkab.go.id, KPU: Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula (dalam rangka peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Bagi Pemula di Kabupaten Cilacap ,April 2015. Hlm 2

Paat, Yustinus. 2015. *KPU: Tidak Ada Kampanye di Pilkada Susulan Kalteng dan Fak-Fak.* <http://www.beritasatu.com/nasional/337033-kpu-tidak-ada-kampanye-di-pilkada-susulan-kalteng-dan-fakfak.html>.